

STUDI DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERDA BARU TENTANG PAJAK “ATAS PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET” KABUPATEN TULANG BAWANG

Nandang¹

Abstrak

Pelaksanaan UU No.22 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan UU No.25 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah yang sedang bergulir saat ini. Otonomi daerah tersebut memberikan kewenangan serta keleluasaan kepada Pemerintah Daerah Tulang Bawang dalam mengembangkan potensi ekonomi dan sumber-sumber keuangan daerah yang dimilikinya. Hal tersebut perlu dilakukan karena kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kecil (sekitar 10 %) dari anggaran rutin tahun ini (APBD). Keadaan demikian itulah yang mendorong pemerintah daerah otonom berupaya menggali potensi perekonomian untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah sendiri. Yang diantaranya adalah dengan rencana mengoptimalkan PAD melalui potensi berkembangnya pengusahaan sarang burung walet, dengan jalan dibuatkannya perda tentang pajak atas pengusahaan sarang burung walet di kabupaten Tulang Bawang.

Kata kunci : pajak

1. PENDAHULUAN

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pelaksanaan UU No.22 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan UU No.25 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah.

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah digulirkan sejak tahun 2001, memberi kewenangan serta keleluasaan kepada Pemerintah Daerah Tulang Bawang dalam mengembangkan potensi ekonomi dan sumber-sumber keuangan daerah yang

¹ Staf Pengajar Fakultas Teknik Universitas Lampung, Jl. Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
Ph/Fax : (0721) 788217/ (0721) 704947.

dimilikinya. Potensi utama daerah ini meliputi bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perindustrian dan perikanan mencerminkan kekuatan dan sebagai daya dukung peningkatan ekonomi, tak terkecuali dengan semakin berkembangnya pengusaha sarang burung walet, yang tentunya ini akan berpengaruh kepada kebijakan pemerintah setempat dalam mengantisipasinya.

Apabila pemerintah daerah dengan partisipasi masyarakat mampu merubah potensi tersebut menjadi kekuatan ekonomi riil mereka, sumber-sumber pendapatan dan kemampuan keuangan daerah akan meningkat. Dengan berkembangnya perekonomian daerah, maka dampak positif juga yang akan dinikmati oleh pemerintah daerah dalam bentuk penyerapan tenaga kerja, meningkatnya PAD dan lain sebagainya, sehingga akan bermuara pada penurunan terhadap ketergantungan pada pemerintah pusat.

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah perlu melakukan pengkajian terhadap potensi ekonomi daerah. Hal tersebut perlu dilakukan karena kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kecil (sekitar 10 %) dari anggaran rutin tahun ini (APBD). Sementara itu dana dari pemerintah pusat terutama yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), sebagian besar jumlahnya digunakan untuk membayar gaji pegawai daerah. Keadaan demikian itulah yang mendorong pemerintah daerah otonom berupaya menggali potensi perekonomian untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah sendiri.

Sehingga kedepan, Pemerintah Daerah Tulang Bawang perlu memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang tatalaksana pengelolaan pengusaha sarang burung walet daerah tersebut berupa pajak.

1.1 Pajak

Seperti apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa yang dimaksud dengan pajak daerah (pajak), adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

Dalam perkembangan terakhir, ada beberapa Peraturan Daerah mengenai pajak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, yang nampaknya perlu dikaji-ulang dan disesuaikan dengan perkembangan jalannya roda ekonomi maupun teknologi di daerah ini.

Ada beberapa alasan mengapa perda tersebut di suatu daerah perlu diadakan (perda baru) atau diubah (perda yang sudah ada) :

1. Upaya optimalisasi keuangan daerah dari PADS
2. Perda yang berlaku telah berumur lima tahun atau lebih.
3. Dasar hukum perda yang berlaku telah berubah, jadi perda tidak sesuai dengan aturan yang mengaturnya (PP, UU dsb.) UU No. 34 tahun 2000 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah serta PP No. 65 tentang pajak daerah dan No. 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah.
4. Perubahan situasi dan kondisi serta potensi ekonomi dan teknologi yang sedang berlangsung, dan ke depan menuntut adanya regulasi ulang tentang pajak.
5. Penyederhanaan perda tanpa harus mengurangi hasil pendapatan.

Juga dengan adanya perkembangan tersebut diatas nampaknya perlu adanya peraturan-peraturan daerah tentang pajak tertentu yang baru/dimunculkan untuk bisa mewadahi yang berhubungan dengan perkembangan aktifitas ekonomi, teknologi, baik yang ada sekarang dan kemungkinan perkembangannya dimasa mendatang. Bagi kabupaten/kota upaya Penetapan Perda tentang Pajak baru (Ekstensifikasi) dimungkinkan menurut perundang-undangan yang berlaku karena:

1. Jenis pajak Kabupaten/Kota tidak bersifat limitatif, artinya Kabupaten/Kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang ditetapkan secara eksplisit dalam UU No.34 Tahun 2000, dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik dengan memperhatikan kriteria yang ditetapkan dalam UU tersebut.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 4, kepada daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan perda jenis pajak daerah lainnya yang dipandang sesuai dengan situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerahnya, tetapi tetap memerhatikan kesederhanaan jenis retribusi daerah dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Selain itu Kriteria Pajak baru yang dapat ditetapkan kabupaten diluar ketentuan UU No. 34 Tahun 2000 pasal 2 ayat 2, adalah :

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi;
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek pajak Pusat;
5. Potensinya memadai;
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan Menjaga kelestarian lingkungan.

1.2 Isi dan Ketentuan Perda Pajak

Penetapan perda pajak dan perlu mengikuti langkah-langkah yang diatur dalam UU no 34 tahun 2000. Isi dan ketentuan Perda Pajak sebagai berikut:

1. Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Peraturan Daerah tentang Pajak tidak dapat berlaku surut.
3. Peraturan Daerah tentang Pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan-ketentuan dengan sistematika yang telah ditentukan dalam peraturan.
4. Peraturan Daerah tentang Pajak dapat mengatur ketentuan mengenai :
 - a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
 - b. tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa;
 - c. asas timbal balik.
 - d. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan.
 - e. Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Daerah."

1.3 Langkah-Langkah Optimalisasi Pungutan Pajak

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui **optimalisasi intensifikasi** pemungutan pajak daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Memperluas basis penerimaan
Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
2. Memperkuat proses pemungutan
Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.
3. Meningkatkan pengawasan
Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik
Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Selanjutnya, ekstensifikasi perpajakan dan intensifikasi juga dapat dilakukan melalui studi yang komprehensif untuk menilai kelayakan objek dan subjek Pajak dan retribusi baru yang dilihat dari segi efektivitas, efisiensi dan kemungkinan dampak sosial, politik dan ekonominya.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Pengumpulan Data.

1. Penelitian dilakukan di Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pengumpulan data primer;
 - a. melakukan wawancara dengan berbagai instansi terkait (kabupaten Tulang Bawang dan beberapa Kabupaten *benchmark di Sumatera, Jawa dan Bali*) dan *stake holder*,
 - b. observasi lapangan di Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten *benchmark*
3. Pengumpulan data sekunder: kajian dokumen resmi UU,PP, Kepres, Kepmen Perda dan administrasi Penerimaan PAD Daerah Kab Tulang Bawang dan beberapa kabupaten *benchmark*.

2.2. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengkajian terhadap potensi ekonomi dan keuangan Daerah, dimaksudkan untuk mengidentifikasi beberapa jenis sumber daya ekonomi dan keuangan, yang kemudian

dianalisa dan didiskusikan, memilih alternatif dan menyusun strategi agar semuanya akan menjadi optimal. Dalam strategi pengkajian ini kita mengelompokkan pengkajian yang mungkin bisa dilakukan, yang diantaranya adalah ; mengidentifikasi potensi ekonomi daerah yang sudah tergali dan yang belum tergali, dan mengidentifikasi penerimaan asli daerah sendiri (PADS) terutama yang bersumber dari Pajak.

Dengan adanya perkembangan daerah kabupaten Tulang Bawang ini, sangat perlu adanya peraturan-peraturan daerah tentang pajak tertentu yang baru/dimunculkan untuk bisa mewadahi yang berhubungan dengan perkembangan aktifitas ekonomi, baik yang ada sekarang dan kemungkinan perkembangannya dimasa mendatang. Bagi kabupaten/kota upaya Penetapan Perda Pajak baru (Ekstensifikasi) dimungkinkan menurut perundang-undangan yang berlaku, artinya Kabupaten/Kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang ditetapkan secara eksplisit dalam UU No.34 Tahun 2000, dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik dengan memperhatikan kriteria yang ditetapkan dalam UU tersebut.

Pengkajian terhadap potensi ekonomi dan keuangan Kabupaten Tulang Bawang dilakukan untuk mengidentifikasi beberapa jenis sumber daya ekonomi dan keuangan Daerah, yang diantaranya adalah kemungkinan dibuatnya Perda yang memayungi atas kegiatan ekonomi, yang berhubungan dengan perkembangan pengusahaan sarang burung walet. Dimana dasar hukum perda yang dibuat harus sesuai dengan aturan yang mengaturnya (PP, UU dsb.) UU No. 34 tahun 2000 tentang Retribusi Daerah, serta PP No. 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah.

Data-data sebagai bahan rancangan perda tersebut kemudian dianalisa dan didiskusikan, memilih alternatif dan menyusun strategi agar semuanya akan menjadi optimal. Dalam strategi pengkajian ini kita mengelompokkan pengkajian yang diantaranya adalah ; mengidentifikasi potensi ekonomi daerah yang sudah tergali dan yang belum tergali.

Rancangan Perda Pajak

Hasil dari pengkajian tersebut, disusunlah rancangan perda mengenai “Pajak Atas Pengusahaan Sarang Burung Walet”, dengan isi dan ketentuan serta susunan dan sistematika sebagai berikut:

- a. nama, objek, dan subjek Retribusi;
- b. golongan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2); (a. Retribusi Jasa Umum; b. Retribusi Jasa Usaha; c. Retribusi Perizinan Tertentu)
- c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
- d. prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;
- e. struktur dan besarnya tarif Retribusi;
- f. wilayah pemungutan;
- g. tata cara pemungutan;
- h. sanksi administrasi;
- i. tata cara penagihan; dan
- j. tanggal mulai berlakunya.

Peraturan Daerah tersebut mengatur ketentuan mengenai : masa pajak, pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya, tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. KESIMPULAN

Alasan-alasan mengapa beberapa perda baru mengenai pajak perlu dibuat/dimunculkan adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya Perda yang memayungi atas kegiatan ekonomi, yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan sarang burung walet.
2. Dasar hukum perda yang dibuat harus sesuai dengan aturan yang mengaturnya (PP, UU dsb.) UU No. 34 tahun 2000 tentang Retribusi Daerah, serta PP No. 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.
3. Penyederhanaan perda tanpa harus mengurangi hasil pendapatan
4. Upaya optimalisasi keuangan daerah dari PADS
5. Perubahan situasi dan kondisi serta potensi ekonomi dan teknologi yang sedang berlangsung, dan ke depan menuntut adanya regulasi ulang tentang pajak.
6. Juga dengan adanya perkembangan tersebut diatas nampaknya perlu adanya peraturan-peraturan daerah tentang pajak tertentu yang baru/dimunculkan untuk bisa mewadahi yang berhubungan dengan perkembangan aktifitas ekonomi, teknologi, baik yang ada sekarang dan kemungkinan perkembangannya dimasa mendatang.

4.2. Saran

1. Perlu adanya pengkajian/perubahan pada perda-perda yang lainnya, sehubungan dengan acuan/ pijakan hukum yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah yang terbaru. Jadi perda tidak sesuai lagi dengan aturan yang mengaturnya (PP, UU dsb.) UU No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah, serta PP No. 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.
2. Selanjutnya, ekstensifikasi dan intensifikasi pajak juga dapat dilakukan melalui studi yang komprehensif untuk menilai kelayakan objek dan subjek, pajak baru yang dilihat dari segi efektivitas, efisiensi dan kemungkinan dampak sosial, politik dan ekonominya.

DAFTAR PUSTAKA

- Brennan, Geoffrey dan Buchanan, James (1981), *Tax Limits and The Logic of Constitutional Restriction, dalam Democratic Choice and Taxation A Theoretical and Empirical Analysis*, Hettich, Walter and Winer, Stanley, L. Cambridge University Press, hal.20-22.
- LPEM Universitas Indonesia bekerjasama dengan Clean Urban Project, RTI (1999), *Laporan Studi Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Keuangan Daerah di Indonesia*, Jakarta.
- OECD (1999): *Taxing Powers Of State and Local Government*, OECD Publication Service, France.
- Republik Indonesia, *Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia, *Undang-undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*.
- Republik Indonesia, *Undang-undang No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Ter-Minassian, Teresa (1997), *Fiscal Federalism in Theory and Practice*, International Monetary Fund, Washington.